PEREMPUAN, KORUPSI DAN KESETARAAN GENDER

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW

KORUPSI DAN PEREMPUAN: PERSPEKTIF KORBAN

Perempuan sebagai pemegang tanggung jawab utama mengurus anak: tekanan berlipat pada korupsi sektor pelayanan publik (misalnya: korupsi sektor pendidikan → pemerasan dalam penerimaan siswa baru)

Kehilangan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan dan mendapatkan promosi → korupsi (suap) dalam pengelolaan SDM sektor publik

Masalah infrastruktur yang buruk menyebabkan stagnani status ekonomi perempuan → perempuan pedagang

Korban dalam pelayanan publik sektor kesehatan yang buruk dan korup → ibu hamil dan melahirkan

PEREMPUAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Muncul pemimpin-pemimpin perempuan di pemerintahan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dipandang bersih dan memimpin dengan luar biasa

Perempuan sebagai penyebar nilai-nilai dasar pada lingkup keluarga dan lingkungan sosial → Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)

Gerakan masyarakat sipil yang dimotori perempuan semakin mendapatkan tempat, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk memimpin upaya-upaya masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi

Efeknya terhadap pemberantasan korupsi: Risma di Kota Surabaya?

PEREMPUAN DAN APBS PARTISIPATIF

Case study program APBS Partisipatif di Garut

Keterlibatan orang tua murid dalam perencanaan anggaran sekolah

Sebagian besar yang terlibat adalah ibu-ibu (tanggung jawab yang melekat di konteks sosial Garut mengingat laki-laki melakukan migrasi)

Pada mulanya khawatir, karena memasuki wilayah dan urusan pemerintah adalah sesuatu yang tabu

Kemauan untuk terlibat besar, dengan membangun paradigma: melakukan upaya-upaya bersama untuk kepentingan kita sendiri

Usulan-usulan penganggaran di sekolah jadi lebih sensitive gender

Tuntutan orang tua murid jauh lebih didengar dan diakomodasi oleh manajemen sekolah

PENUTUP

Perempuan adalah korban utama korupsi, oleh karena itu, perempuan harus dilibatkan dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi

Faktanya, perempuan dapat menjadi penggerak pemberantasan korupsi: jika diberi kesempatan

Keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik, bukan hanya akan menekan korupsi, namun akan menjadikan perencanaan kebijakan publik sensitive terhadap kebutuhan perempuan